



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

INSPEKTORAT

Alamat : Jl. Indah No. 1 Telp. (021) 875 6565 Cibinong 16914
www.inspektorat.bogorkab.go.id | e-mail : inspektorat@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 700/ /SK - INSPEKTORAT
TENTANG
RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2018

- Menimbang : a. Bahwa sebagai dokumen perencanaan tahunan, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- b. bahwa untuk menjamin terwujudnya konsistensi perencanaan pembangunan tahun 2018 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja-SKPD;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2018.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 Nomor 25 Seri E);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 21);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018;
 - j. Peraturan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 10);
 - k. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/75/Kpts/Per-UU/2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Renja Inspektorat Kabupaten Bogor merupakan dokumen perencanaan yang berisi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Tahun 2017.
- (2) Renja Inspektorat Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan bagi:
 - a. Penyusunan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2018;
 - b. Penyusunan program kerja bagi para pejabat eselon III, eselon IV dan Staf di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bogor.

Pasal 2

Sistematika Renja Inspektorat Kabupaten Bogor terdiri dari :

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Keputusan Inspektur Kabupaten Bogor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : C I B I N O N G

Tanggal : Januari 2018

INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR



Drs. BENNY DELYUZAR, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19591119 198907 1 001

RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Memasuki tahun kelima perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor periode tahun 2013-2018, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2018 perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, terutama dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018, Rencana Strategis (Renstra) PD 2013-2018, dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2013-2018.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Renja PD secara umum diatur dalam Pasal 273, dimana Renja PD merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD. Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Disamping itu, rancangan Renja PD merupakan bahan dalam penyusunan Rancangan RKPD, dan Renja PD ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah memberikan beberapa perubahan, terutama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Dibarengi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, terdapat kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang dilaksanakan meskipun desa bukan merupakan daerah otonom. Lahirnya kedua Undang-Undang ini tentu akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kewenangan PD dalam menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Disamping itu, dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bogor yakni mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia, penyusunan Renja PD tahun 2018 harus diarahkan pada upaya penuntasan visi tersebut. Hal lain yang perlu diintegrasikan adalah seluruh program/kegiatan yang menjadi bagian isi Renja PD harus diarahkan untuk mendukung tema, prioritas dan fokus pembangunan tahun 2018 dan standar pelayanan minimal berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan.

Dokumen Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJM. Pada **Gambar 1** diperlihatkan alur penyusunan Renja.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai berikut:

1. **Undang-Undang** Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. **Undang-Undang** Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
3. **Peraturan** Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. **Peraturan** Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
5. **Peraturan** Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 10);
 12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/75/Kpts/Per-UU/2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2017 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan satu tahun yang menjabarkan Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, sebagai salah satu wujud dari proses perencanaan yang dilakukan oleh sebuah SKPD untuk melaksanakan kegiatan tahunan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai landasan/pedoman dalam pelaksanaan anggaran tahun 2017, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Inspektorat Kabupaten Bogor.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
 - 3.3 Program dan Kegiatan

- BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Pelaksanaan kegiatan Renja SKPD Tahun 2017 terdiri dari 7 (delapan) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan. Berikut disampaikan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bogor pada tahun 2016 serta realisasi target kinerjanya:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (96,75%);
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (98,48%);
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor (98,72%);
4. Penyediaan alat tulis kantor (96,37%);
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (99,43%);
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (99,70%);
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (99,83%);
8. Penyediaan bahan logistik kantor (100%);
9. Penyediaan makanan dan minuman (100%);
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah (99,91%);
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran (91,40%);
12. Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD (99,42%);
13. Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian (93,34%);
14. Penyediaan pengelolaan administrasi barang (98,88%);
15. Penyediaan pelayanan keamanan kantor (99,00%).

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Mebeulair (0,00%);
2. Pengadaan peralatan kantor (94,19%);
3. Pengadaan perlengkapan kantor (96,18%);

4. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi (100,00%)
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (99,74%);
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (96,52%);
7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor (99,78%);
8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (99,74%);
9. Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor (99,44%);
10. Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Jaringan Listrik dan komunikasi (99,69%).
11. Pembuatan kanopi parkir (99,78%)

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya (0,00%).

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal (100%);
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (91,66%);

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (83,89%);
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran (86,09%);
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun (87,07%);
4. Penyusunan perencanaan anggaran (98,66%);
5. Penatausahaan keuangan SKPD (98,62%);
6. Penyusunan Renstra (72,28%);
7. Publikasi Kinerja SKPD (100%);
8. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (74,00%);
9. Penyusunan Renja (78,28%).

F. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala di Lingkup OPD (99,92%);
2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (99,59%);
3. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan (82,98%);
4. Koordinasi Pengawasan komprehensif (71,10%);

5. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (90,22%);
6. Review laporan keuangan pemerintah daerah (99,27%);
7. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di Lingkup Desa (99,02%);
8. Pelaksanaan Audit Khusus/Tematik (91,34%);
9. Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD (96,89%);
10. Pengawasan bantuan keuangan Kabupaten/Kota (Banprop) (96,93%)

G. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (84,85%).
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan (99,77%)

H. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan

1. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (93,18%);
2. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Secara Online (73,03%).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan sasaran yang ada di Inspektorat Kabupaten Bogor.

Adapun hasil evaluasi dan analisis kinerja capaian berdasarkan pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor pada tahun 2016, dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan, yaitu:

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Dokumen Pegawasan	Dok	485	605	124,74
2.	Tindaklanjut Hasil Pengawasan	%	100,00	100,00	100,00
Rata- rata					112,37

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan pada tahun 2016, sebagai berikut :

1. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (dokumen pengawasan) pada tahun 2016 di targetkan sebanyak 485 dokumen terealisasi sebanyak 605 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 124,74%. Capaian kinerja tahun 2016 lebih tinggi sebesar 11,57%, apabila dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini terjadi karena pada tahun 2016 terdapat peningkatan jumlah objek pemeriksaan yang relatif lebih tinggi di bandingkan dengan tahun 2015. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini Laporan Hasil Pengawasan di tahun 2016 telah tercapai sebanyak 605 dokumen dari target sebanyak 485 dokumen atau telah tercapai 124,74%.
2. Jumlah Tindak lanjut hasil pengawasan pada tahun 2016 di targetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar 100,00%. Kondisi tersebut sama bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, dimana capaian pada tahun 2015 sebesar 100,00%.

Anggaran untuk mewujudkan sasaran kesatu mencapai sebesar Rp10.343.723.000,00 yang terealisasi sebesar Rp10.093.467.730,00 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 97,58%.

Sasaran Kesatu tersebut diwujudkan dalam 1 (satu) program utama, yaitu :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yaitu dianggarkan sebesar Rp10.343.723.000,00 terealisasi sebesar Rp10.093.467.730,00 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 97,58%.

Sasaran 2: Meningkatkan Fungsi Peran Inspektorat Mewujudkan Good Government, yaitu:

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi	Dok	1	1	100,00

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Birokrasi/PMPRB Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan	Dok	3	3	100,00
Rata- rata					100,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis Meningkatkan Fungsi Pembinaan dan penjaminan Mutu pada tahun 2016, sebagai berikut :

1. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi pada tahun 2016 dari target 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 Dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 100%;
2. Jumlah dokumen sistem dan prosedur pengawasan pada tahun 2016 dari target sebanyak 3 dokumen terealisasi sebanyak 3 dokumen sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Kondisi tersebut sama bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, dimana capaian pada tahun 2016 sebesar 100,00%.

Anggaran untuk mewujudkan sasaran kedua mencapai sebesar Rp1.082.728.000,00 yang terealisasi sebesar Rp995.681.288,00. sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 91,96%.

Sasaran Kedua tersebut diwujudkan dalam 1 (satu) program utama, yaitu :

1. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan yaitu dianggarkan sebesar Rp1.082.728.000,00 terealisasi sebesar Rp995.681.288,00 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 91,96%.

Sasaran 3 : Meningkatnya Profesionalisme serta Keterampilan Aparatur Pengawasan, yaitu:

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Auditor	Orang	50	38	76,00
2.	Jumlah P2UPD	Orang	33	18	54,55
Rata- rata					65,27

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis Meningkatkan Fungsi Pembinaan dan penjaminan Mutu pada tahun 2014, sebagai berikut :

1. Jumlah auditor pada tahun 2016 di targetkan sebanyak 50 orang terealisasi sebanyak 38 orang sehingga capaian kinerjanya sebesar 76,00%. Capaian kinerja tahun 2016 lebih rendah sebesar 18,74% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015. Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia yang diusulkan untuk mengikuti diklat jabatan fungsional Auditor. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini Jumlah auditor di tahun 2016 telah tercapai sebanyak 38 orang dari target 50 orang atau telah tercapai sebesar 76,00%.
2. Jumlah P2UPD ditargetkan sebanyak 33 orang terealisasi sebanyak 18 orang sehingga capaian kinerjanya sebesar 54,55%. Capaian kinerja tahun 2016 lebih rendah sebesar 35,93% apabila dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini terjadi karena terbatasnya tenaga yang profesional di bidang pengawasan yang berhubungan dengan Jabatan fungsional P2UPD, dimana masih terdapat Peraturan yang belum disempurnakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD sampai dengan saat ini Jumlah P2UPD telah tercapai sebanyak 18 orang dari target sebanyak 33 orang atau telah tercapai sebesar 54,55%.

Dalm mewujudkan Sasaran Strategis Ketiga. Anggaran untuk mewujudkan sasaran ketiga mencapai sebesar Rp401.895.000,00 yang terealisasi sebesar Rp345.486.202,00. sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 85,96%.

Sasaran Ketiga tersebut diwujudkan dalam 1 (satu) program utama, yaitu :

1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yaitu dianggarkan sebesar Rp401.895.000,00 terealisasi sebesar Rp345.486.202,00 sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 85,96%.

Berdasarkan hasil tersebut diatas dapat dikatakan bahwa capaian kinerja pada Inspektorat atas kegiatan ini belum mencapai

target yang diharapkan, dan hal ini harus menjadi dasar dan upaya perbaikan sehingga capaian jangka menengah Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dapat tercapai, mengingat tahun 2018 merupakan tahun terakhir atas Renstra Tahun 2013-2018.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Isu strategis yang berkembang saat ini serta prediksi situasi dan kondisi lima tahun ke depan dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Kabupaten Bogor menjalankan tugas pokok dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor serta dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP, Inspektorat Provinsi) yang melakukan pengawasan di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan sinergi pengawasan.

Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali BPK sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan negara.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal dapat dijabarkan melalui 2 (dua) kondisi, yaitu kondisi positif dan negatif sebagai berikut :

Kondisi Positif

- Adanya peningkatan penyelenggaraan administrasi umum, dengan penyediaan fasilitas kerja pegawai agar tercipta suasana kerja yang menyenangkan;
- Adanya peningkatan mutu aparatur pengawasan. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal dalam rangka pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah;

- Peningkatan koordinasi dan pembinaan teknis pengawasan;
- Peningkatan Operasional pemeriksaan serta penanganan terhadap kasus-kasus aduan masyarakat;
- Sistem Pengendalian Intern dapat dilaksanakan di masing-masing unit kerja;
- Adanya peningkatan semangat perbaikan kinerja aparatur pemerintah.

Kondisi Negatif

- Hasil survei Peringkat Kemudahan Berbisnis oleh International Finance Corporation (IFC) pada tahun 2013 Indonesia berada pada peringkat ke 129 dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu peringkat ke 126;
- Hasil survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) oleh Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2013 IPK Indonesia sebesar 3.0 dari skala 10.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Secara umum program kegiatan pada tahun 2016 tidak jauh berbeda dengan rancangan awal RKPD, akan tetapi ada 7 (Tujuh) kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 dan sangat penting untuk diakomodir pada tahun 2016 agar tujuan organisasi dapat tercapai secara maksimal (lihat tabel 2.3 pada lampiran), yaitu:

1. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Penambahan Jumlah anggaran melalui penambahan jumlah Auditor dan Hari Kerja yang mengakomodir kegiatan tersebut untuk memaksimalkan terselesaikannya kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala di lingkup desa.
Kebutuhan akan pengawasan yang lebih maksimal di lingkup desa melalui penambahan jumlah hari pemeriksaan di setiap pemeriksaan ke desa.
3. Pelaksanaan Pemeriksaan/Audit Tematik
Sehubungan dengan memaksimalkan peran Inspektorat sebagai *Counseling partner* dan *Quality Assurance*, maka diperlukan peningkatan peran Inspektorat dalam Audit Dengan Tujuan Tertentu melalui Penambahan sub kegiatan Audit Tematik

diantaranya, Audit Kinerja Puskesmas, Audit DSP dan SPP Sekolah Negeri, Audit BOS, Audit Fasos dan Fasum, serta Audit Aset Daerah.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada tahun 2013 terdapat kegiatan yang merupakan usulan dari masyarakat yaitu evaluasi dana BOS, namun pada tahun 2014 dan 2015 kegiatan ini ditingkatkan menjadi Pemeriksaan/Audit Dana BOS untuk memaksimalkan tingkat pengawasan terhadap sekolah yang menerima dana BOS. Lalu kegiatan ini bertujuan untuk memantau pengelolaan dana BOS, sehingga dapat diketahui peruntukan dana BOS yang sudah disalurkan ke sekolah-sekolah penerima, selain itu kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dari penggunaan dana BOS.

Selain itu pada tahun 2016 dilaksanakan kegiatan Audit Fasos dan Fasum serta Audit Aset Daerah, yang merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK – RI guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah di Kabupaten Bogor.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Untuk menjaga keharmonisan penyelenggaraan pembangunan pada tingkat nasional dan provinsi, maka Inspektorat dalam menetapkan program dan kegiatan tetap memperhatikan arahan dari nasional dan provinsi. Berdasarkan hasil telaahan terdapat 4 (empat) kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan 1 (satu) kegiatan menjadi prioritas provinsi, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Nasional		
1	Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Kementrian PAN & RB	Proses Penyusunan Master Plan Reformasi Birokrasi
2	Monitoring Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi	Kementrian PAN & RB	
3	Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Itjen. Kemendagri	
4	Unit Pelaksana Integritas	Kementrian PAN & RB	
B	Provinsi		
1	Meningkatkan manfaat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan (<i>Counseling Partner</i>)	Inspektorat Provinsi Jawa Barat	Peningkatan pemahaman SDM Inspektorat

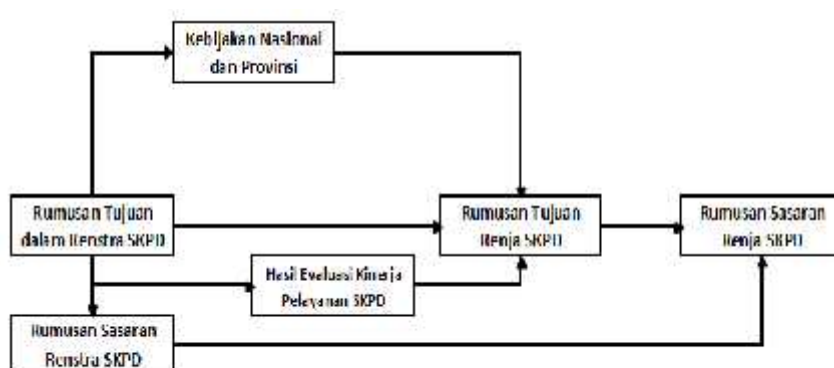
3.2 TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Untuk menjamin kesinambungan dan keberlangsungan program-program pengawasan tersebut, perlu disusun Rencana Kerja Tahunan yang merupakan uraian dari Renstra Inspektorat yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran selama periode waktu 5 (lima) tahun ke depan yang tujuannya

akan digunakan sebagai acuan perencanaan program dan pelaksanaan teknis operasional Inspektorat Kabupaten Bogor Timur untuk kurun waktu 2014-2019.

Selain daripada itu, sasaran dalam penyusunan Renja Inspektorat 2016 harus tetap mempertimbangkan latar belakang, karakteristik dan kondisi daerah Kabupaten Bogor. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsi organisasi, menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi.



Gambar 3.1

Adapun tujuan dari Inspektorat Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan;
2. Meningkatkan Fungsi Pembinaan dan Penjaminan Mutu oleh Inspektorat;
3. Meningkatkan Kompetensi Aparat dan Ketatalaksanaan Inspektorat;

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi (lembaga) dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sasaran organisasi harus dapat menggambarkan keinginan yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Agar sasaran dapat efektif hendaknya sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai dan terukur, menantang namun dapat

dicapai, berorientasi pada hasil serta dapat dicapai dalam waktu satu tahun atau berlaku pada masa sekarang.

Inspektorat Kabupaten Bogor mempunyai sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas laporan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
2. Meningkatnya Fungsi dan Peran Inspektorat dalam mewujudkan Good Government;
3. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawasan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bogor tahun 2016 (lihat tabel 2.4 pada lampiran), adalah sebagai berikut:

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
4. Penyediaan alat tulis kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor;
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
8. Penyediaan bahan logistik kantor;
9. Penyediaan makanan dan minuman;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah;
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran;
12. Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD;
13. Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian;
14. Penyediaan pengelolaan administrasi barang;
15. Penyediaan pelayanan keamanan kantor.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kontruksi Area Parkir;

2. Pengadaan peralatan kantor;
3. Pengadaan perlengkapan kantor;
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor;
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor;
8. Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor;
9. Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Listrik Kantor;
10. Pemeliharaan jaringan komputer.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal;
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
4. Penyusunan perencanaan anggaran;
5. Penatausahaan keuangan SKPD;
6. Penyusunan Renstra;
7. Publikasi kinerja SKPD.
8. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
9. Penyusunan Renja SKPD.

E. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala di lingkup OPD;
2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
4. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
5. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
6. Review laporan keuangan pemerintah daerah;
7. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala di lingkup desa;

8. Pelaksanaan Pemeriksaan/Audit Tematik.
9. Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD;
10. Bantuan operasional pemeriksaan bantuan hibah, bansos dan bantuan keuangan provinsi.

F. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan.

G. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan

1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
2. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara online.

BAB IV

PENUTUP

Renja Inspektorat Kabupaten tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 di lingkup Inspektorat Kabupaten, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2017 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014-2018.

Dalam rangka mencapai target sebagai kabupaten termaju di Indonesia, isi Renja Inspektorat Kabupaten tahun 2017 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Inspektorat Kabupaten, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2017 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Inspektorat Kabupaten sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Inspektorat Kabupaten.

Semoga Renja Inspektorat Kabupaten tahun 2017 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2017. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di : C I B I N O N G
Tanggal : Januari 2017

INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR



Drs. BENNY DELYUZAR, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19591119 198907 1 001

**RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Inspektorat tahun 2017 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Periode tahun 2013-2018, dimana sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Bogor yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia.

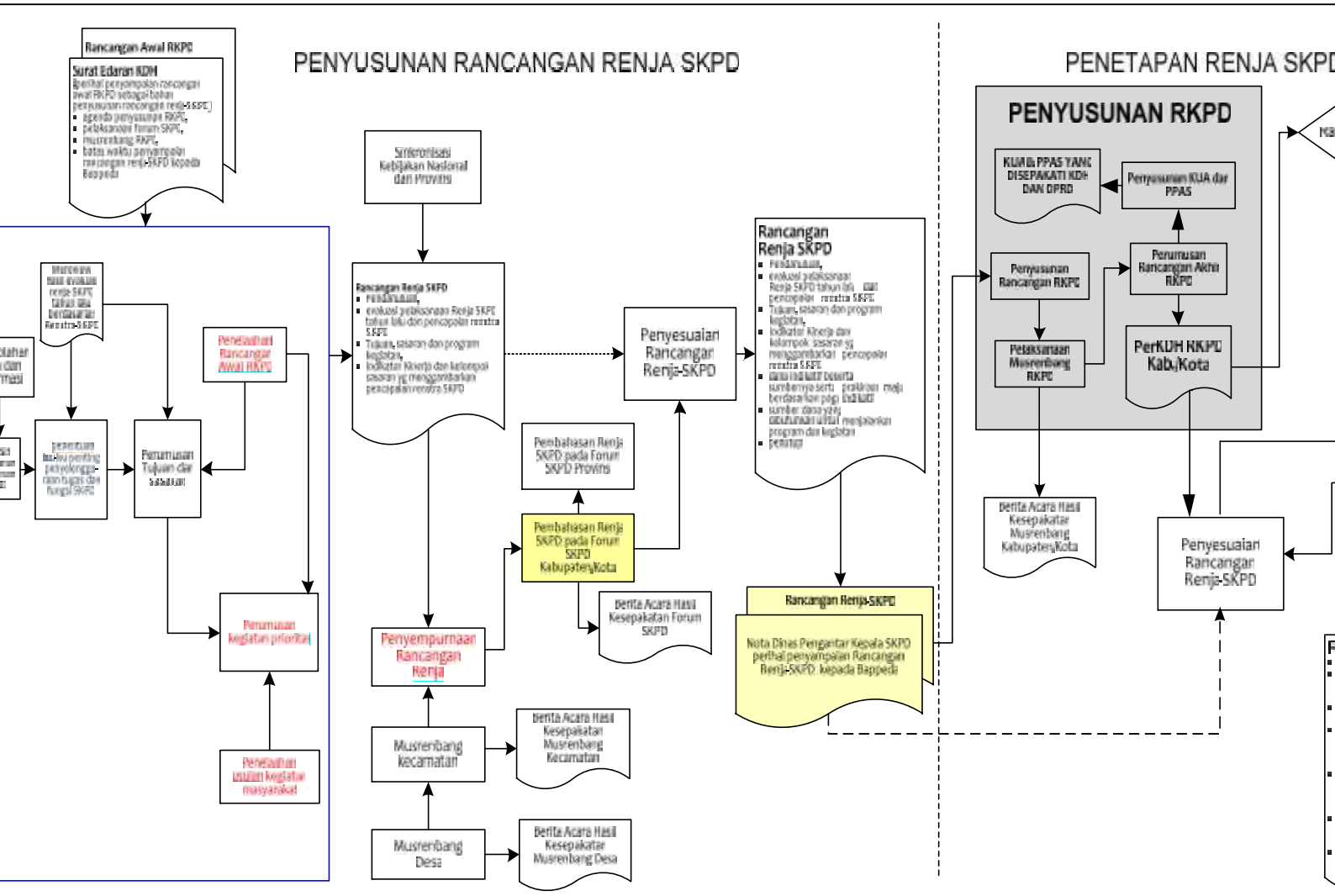
Salah satu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh unit kerja di Pemerintah Daerah adalah Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja SKPD

adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD.

Dokumen Renja Inspektorat Kabupaten tahun 2017 mengacu kepada Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor periode tahun 2013-2018. Disamping itu, Renja Inspektorat Kabupaten harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2016, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Inspektorat Kabupaten.

Disamping mengacu pada Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor, Dokumen Renja juga berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 yang merupakan bagian integral dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2013-2018. Selain dari pada itu Renja SKPD tahun 2016 merupakan bagian integral dari implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode masa jabatan 2013-2018 yang menginginkan agar dalam periode kepemimpinan lima tahun dapat mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia. Untuk itu, proses penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2017 dilakukan secara serius dan bersinergi antar lembaga, sehingga seluruh target indikator yang menjadi kinerja SKPD yang telah dirumuskan dalam RPJMD dan Renstra SKPD dapat dicapai sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Dokumen Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD dan RPJM. Pada **Gambar 1** diperlihatkan alur penyusunan Renja.



Gambar 1.1 Penyusunan Renja SKPD

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 10);
 12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/75/Kpts/Per-UU/2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2017 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan satu tahun yang menjabarkan Renstra Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, sebagai salah satu wujud dari proses perencanaan yang dilakukan oleh sebuah SKPD untuk melaksanakan kegiatan tahunan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai landasan/pedoman dalam pelaksanaan anggaran tahun 2017, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Inspektorat Kabupaten Bogor.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN TIM

PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017

- Penanggung Jawab : Inspektur
- Ketua : Sekretaris Inspektorat;
- Wakil Ketua : Kasubag Program dan Pelaporan;
- Sekretaris : Pelaksana pada Subag Program dan Pelaporan;
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu I;
2. Inspektur Pembantu II;
3. Inspektur Pembantu III;
4. Inspektur Pembantu IV;
5. Koordinator Fungsional;
6. Unsur Pelaksana pada Subag Program dan Pelaporan;
7. Unsur Pelaksana pada Subag Keuangan;
8. Unsur Pelaksana pada Subag Umum dan Kepegawaian.

Tabel 2.1
EVALUASI HASIL RKPD 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2017
KABUPATEN BOGOR

SKPD : INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = Evkin Tri IV	11=(10/4)			
	URUSAN WAJIB BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN												
20	5	1											
	Program pelayanan administrasi perkantoran												
20	5	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai buah	600 buah	500 buah	- buah	- buah	#DIV/0!	- buah	-	
20	5	1	2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya fasilitas komunikasi, air, listrik, dan internet	6 jaringan	6 jaringan	6 jaringan	6 jaringan	1	6 jaringan	2 jaringan	33,33
20	5	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perpanjangan STNK kendaraan unit/tahun	22 unit/tahun	22 unit/tahun	22 unit/tahun	22 unit/tahun	1	26 unit/tahun	3 unit/tahun	11,54
20	5	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan fasilitas kantor	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	1	6 orang	2 orang	33,33
20	5	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	37 jenis	113 jenis	113 jenis	113 jenis	1	35 jenis	20 jenis	57,14
20	5	1	11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Barang cetakan dan penggandaan	22 jenis	22 jenis	22 jenis	22 jenis	1	12 jenis	9 jenis	75,00
20	5	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 jenis	21 jenis	21 jenis	21 jenis	1	10 jenis	0 jenis	0,00
20	5	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat Kabar, Majalah, Buku Perundang-undangan	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	1	10 jenis	1 jenis	10,00
20	5	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tabung Gas Elpiji yang terisi Tabung Pemadam Kebakaran yang terisi	96 kali	96 kali	96 kali	96 kali	1	96 kali	15 kali	15,63
20	5	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jamuan makan dan minum untuk rapat dan tamu	12 kali	6 kali	6 kali	6 kali	1	12 kali	4 kali	33,33
20	5	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Dokumen hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	2 tujuan	2 tujuan	2 tujuan	2 tujuan	1	2 tujuan	1 tujuan	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = Evkin Tri IV	11=(10/4)			
20	5	3	1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin Kartu Absensi	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	#DIV/0!	0 unit	#DIV/0!	
20	5	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	100 stel	103 stel	47 stel	143 stel	3,0425532	100 stel	0 stel	0,00
20	5	5		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur									
20	5	5	1	Pendidikan dan pelatihan formal	Pengiriman peserta	8 orang	26 orang	26 orang	26 orang	1	12 orang	0 orang	0,00
20	5	5	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	1	50 orang	0 orang	0,00
20	5	6		Program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
20	5	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan penataan administrasi program dan pelaporan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	1	2 dok	1 dok	50,00
20	5	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan keuangan semesteran	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	1	2 dok	1 dok	50,00
20	5	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1	1 dok	1 dok	100,00
20	5	6	5	Penyusunan perencanaan anggaran	Dokumen anggaran	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	1	2 dok	1 dok	50,00
20	5	6	6	Penatausahaan keuangan SKPD	Laporan administrasi keuangan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1	1 dok	1 dok	100,00
20	5	6	7	Penyusunan Renstra dan Renja SKPD	Dokumen perencanaan kerja	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	1	2 dok	2 dok	100,00
20	5	6	13	Publikasi Kinerja SKPD	Jumlah Publikasi Kinerja Inspektorat di media	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1	1 tahun	0 tahun	0,00
20	5	6	14	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1	1 dok	1 dok	100,00
20	5	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH									
20	5	20	1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala di lingkup OPD	Hasil Pemeriksaan	365 dokumen	688 dokumen	688 dokumen	688 dokumen	1	803 dokumen	45 dokumen	5,60

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = Evkin Tri IV	11=(10/4)			
20	5	20	2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Hasil Penanganan Kasus	100 %	24,36 %	24,36 %	24,36 %	1	40,00 %	10,00 %	25,00
20	5	20	6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Hasil Tindak Lanjut	5 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1	5 dokumen	1 dokumen	20,00
20	5	20	7	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Laporan Koordinasi Pengawasan	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1	1 dokumen	0 dokumen	0,00
20	5	20	8	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Laporan Evaluasi	4 dokumen	3 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	1	3 dokumen	1 dokumen	33,33
20	5	20	9	Review laporan keuangan pemerintah daerah	Hasil review keuangan	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1	3 dokumen	0 dokumen	0,00
20	5	20	10	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala di lingkup kelurahan dan desa	Hasil Pemeriksaan	120 dokumen	120 dokumen	234 dokumen	234 dokumen	1	417 dokumen	120 dokumen	28,78
20	5	20	11	Fasilitasi LPPD dan LKPJ Masa Akhir Jabatan Kepala Desa	Dokumen Pengawasan	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1	1 dokumen	0 dokumen	0,00
20	5	20	12	Inventarisasi dan penanganan pengaduan masyarakat	Laporan TPPM	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	#DIV/0!	0 dokumen	0 dokumen	#DIV/0!
20	5	20	13	Audit khusus/Tematik	Jumlah dokumen Audit khusus/tematik	2 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1	6 dokumen	0 dokumen	0,00
20	5	20	16	Monitoring dan Evaluasi kinerja SKPD	Dokumen Pengawasan	5 dokumen	5 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	1	6 dokumen	0 dokumen	0,00
20	5	20	18	Fasilitasi DSP	Laporan evaluasi DSP	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1	1 dokumen	0 dokumen	0,00
20	5	21		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan									
20	5	21	1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Orang/Pelatihan	5 Orang / Pelatihan	23 Orang / Pelatihan	23 Orang / Pelatihan	23 Orang / Pelatihan	1	70 Orang / Pelatihan	1 Orang / Pelatihan	1,43
20	5	21	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan pengawasan	Orang/Pelatihan	4 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1	1 jenis	0 jenis	0,00
20	5	43		Progran Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Pengawasan									
20	5	43	1	Penyusunan kebijakan sistem	Pedoman pengawasan	2 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	1	2 dokumen	0 dokumen	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2016	Realisasi Renja SKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2017)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = Evkin Tri IV	11=(10/4)
		dan prosedur pengawasan								
20	5 43 2	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara online	prosentase laporan	100 %	1 dokumen	1 dokumen	1	1 dokumen	0 dokumen	0,00

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kabupaten Bogor

SKPD : INSPEKTORAT

No	Indikator	Kategori	Target Akhir Renstra (2018)		Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun 2017	Proyeksi			Catatan Analisis
					Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (Dok)		643	Dok.	523	523	643	643	643	523	320.900.000	204.600.000	5.325.619.275	
2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (%)		100	%	100	100	100	100	100	100	7.832.139.864	11.949.913.000	426.793.104	
3	Laporan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/PMPRB (Dok)		1	Dok.	1	1	1	1	1	1	138.758.108	65.685.000	47.974.282	
4	Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan (Dok)		2	Dok.	2	2	2	3	3	2	196.461.310	923.568.000	944.614.358	
5	Jumlah Auditor		50	Orang	38	41	44	38	38	41	297.907.122	127.642.258	269.783.153	
6	Jumlah P2UPD		33	Orang	21	18	18	18	18	18	130.788.493	65.377.741	157.921.846	

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kabupaten Bogor

a

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kegutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cibinong		1 Tahun	1.795.494.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cibinong		1 Tahun	1.795.494.000	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah kebutuhan untuk surat menyurat	0 jenis	-	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah kebutuhan untuk surat menyurat	0 jenis	-	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, air, listrik dan internet		218.400.000	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, air, listrik dan internet		218.400.000	
			Telepon	2 jaringan				Telepon	2 jaringan		
			air	1 jaringan				air	1 jaringan		
			listrik	2 jaringan				listrik	2 jaringan		
			internet	1 jaringan				internet	1 jaringan		
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional		14.700.000	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional		14.700.000	
			Kendaraan Roda 2	14 dok STNK				Kendaraan Roda 2	11 dok STNK		
			Kendaraan Roda 4	14 dok STNK				Kendaraan Roda 4	12 dok STNK		
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		- Jumlah petugas kebersihan	6 orang	149.303.000	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		- Jumlah petugas kebersihan	4 orang	149.303.000	
			- Jumlah alat kebersihan kantor	14 jenis				- Jumlah alat kebersihan kantor	15 jenis		
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah kebutuhan ATK untuk pelaksanaan tupoksi	43 jenis	43.763.000	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah kebutuhan ATK untuk pelaksanaan tupoksi	37 jenis	43.763.000	
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		40.499.000	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		40.499.000	
			- Barang cetakan:	10 jenis				- Barang cetakan:	10 jenis		
			- Penggandaan :	2 jenis				- Penggandaan :	2 jenis		
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis	22.889.000	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis	22.889.000	
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan		42.075.000	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan		42.075.000	
			- Surat Kabar	1 jenis				- Surat Kabar	4 jenis		
			- Buku perundang-undangan	1 jenis				- Buku perundang-undangan	1 jenis		
	9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		- Jumlah isi ulang tabung pemadam kebakaran	1 kali	20.960.000	9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		- Jumlah isi ulang tabung pemadam kebakaran	1 kali	20.960.000	
			- Jumlah isi ulang tabung gas	120 kali				- Jumlah isi ulang tabung gas	96 kali		
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah jamuan makan dan minum		45.750.000	10 Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah jamuan makan dan minum		45.750.000	
			- Rapat :	29 kali				- Rapat :	6 kali		
			- Tamu :	33 kali				- Tamu :	6 kali		
	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan		269.560.000	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan		269.560.000	
			- Perjalanan Dalam Daerah	65 hari				- Perjalanan Dalam Daerah	39 hari		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kegutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Perjalanan Luar Daerah	53 hari				- Perjalanan Luar Daerah	23 hari		
	12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran	4 orang	118.094.000	12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran	5 orang	118.094.000	
	13 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD		Jumlah dokumen pengelolaan arsip SKPD	2 jenis dok	196.103.000	13 Jumlah dokumen pengelolaan arsip SKPD		Jumlah dokumen pengelolaan arsip SKPD	2 jenis dok	196.103.000	
	14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian	7 jenis dok	383.454.000	14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian	6 jenis dok	383.454.000	
	15 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang		Jumlah dokumen pengelolaan administrasi barang	4 jenis dok	127.108.000	15 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang		Jumlah dokumen pengelolaan administrasi barang	4 jenis dok	127.108.000	
	16 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor		Jumlah piket keamanan kantor	4 orang	102.836.000	16 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor		Jumlah piket keamanan kantor	4 orang	102.836.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				460.598.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				460.598.000	
	1 Pengadaan Peralatan Kantor		Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan	3 jenis 6 unit	-	1 Pengadaan Peralatan Kantor		Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan	3 jenis 6 unit	-	
	2 Pengadaan Perlengkapan Kantor		Jumlah Perlengkapan kantor yang dibutuhkan		-	2 Pengadaan Perlengkapan Kantor		Jumlah Perlengkapan kantor yang dibutuhkan		-	
			- CCTV	5 Jenis				- CCTV	5 Jenis		
			- Stabilizer	2 Jenis				- Stabilizer	2 Jenis		
			- Sound System	5 Jenis				- Sound System	5 Jenis		
			- Papan Nama Organisasi	3 Jenis				- Papan Nama Organisasi	3 Jenis		
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor SKPD yang terpelihara		136.325.000	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor SKPD yang terpelihara		136.325.000	
			- Pemeliharaan Ruang Arsip	1 gedung				- Pemeliharaan Ruang Arsip	1 gedung		
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		- Jumlah kend. roda 4 yang dipelihara	14 unit	169.325.000	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		- Jumlah kend. roda 4 yang dipelihara	14 unit	169.325.000	
			- Jumlah kend. roda 2 yang dipelihara	14 unit				- Jumlah kend. roda 2 yang dipelihara	14 unit		
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor		Jumlah peralatan kantor di SKPD yang terpelihara	2 jenis	58.334.000	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor		Jumlah peralatan kantor di SKPD yang terpelihara	2 jenis	58.334.000	
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor di SKPD yang terpelihara	1 jenis	50.739.000	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor di SKPD yang terpelihara	1 jenis	50.739.000	
	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor		Luas tanaman dan halaman kantor yang terpelihara	200 m2		7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor		Luas tanaman dan halaman kantor yang terpelihara	200 m2		
	8 Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Listrik Kantor		Jumlah Jaringan/Instalasi Listrik yang terpelihara	1 Jaringan	45.875.000	8 Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Listrik Kantor		Jumlah Jaringan/Instalasi Listrik yang terpelihara	1 Jaringan	45.875.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kegutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				75.750.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				75.750.000	
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan (orang)	99 orang	75.750.000	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan (orang)	99 orang	75.750.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				61.720.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				61.720.000	
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah peserta bimbingan teknis, penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus, dan diklat yang terkirim	15 orang	13.000.000	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah peserta bimbingan teknis, penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus, dan diklat yang terkirim	15 orang	13.000.000	
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		-Jumlah peserta sosialisasi -Jumlah peserta Workshop PPG	80 orang 80 orang	48.720.000	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		-Jumlah peserta sosialisasi -Jumlah peserta Workshop PPG	80 orang 80 orang	48.720.000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				1.047.225.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				1.047.225.000	
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah LAKIP dan LKPJ	2 jenis dok	252.314.000	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah LAKIP dan LKPJ	2 jenis dok	252.314.000	
	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2 jenis dok	50.274.000	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2 jenis dok	50.274.000	
	3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 jenis dok	50.750.000	3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 jenis dok	50.750.000	
	4 Penyusunan Perencanaan Anggaran		- Tersedianya dokumen DPA dan RKA-P/DPA-P - Tersedianya dokumen Pra RKA dan RKA SKPD Tahun 2014	2 jenis dok 2 jenis dok	194.364.000	4 Penyusunan Perencanaan Anggaran		- Tersedianya dokumen DPA dan RKA-P/DPA-P - Tersedianya dokumen Pra RKA dan RKA SKPD Tahun 2014	2 jenis dok 2 jenis dok	194.364.000	
	5 Penatausahaan Keuangan SKPD		Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2017	1 jenis dok	373.222.000	5 Penatausahaan Keuangan SKPD		Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2017	1 jenis dok	373.222.000	
	6 Penyusunan Renstra SKPD		Jumlah dokumen Renstra SKPD yang tersedia	1 jenis dok	37.000.000	6 Penyusunan Renstra SKPD		Jumlah dokumen Renstra SKPD yang tersedia	1 jenis dok	37.000.000	
	7 Penyusunan Renja SKPD		Jumlah dokumen Renja SKPD yang tersedia	1 jenis dok	16.350.000	7 Penyusunan Renja SKPD		Jumlah dokumen Renja SKPD yang tersedia	1 jenis dok	16.350.000	
	8 Publikasi Kinerja SKPD		Publikasi kinerja SKPD di media	1 tahun	47.266.000	8 Publikasi Kinerja SKPD		Publikasi kinerja SKPD di media	1 tahun	47.266.000	
	9 Penyusunan Program Kerja Pengawasan		Jumlah dokumen PKPT yang tersedia	1 jenis dok	25.685.000	9 Penyusunan Program Kerja Pengawasan		Jumlah dokumen PKPT yang tersedia	1 jenis dok	25.685.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kegutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	Tahunan (PKPT)					Tahunan (PKPT)					
6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				7.623.408.000	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				7.640.808.000	
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di Lingkup OPD		Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Internal		4.253.134.000	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di Lingkup OPD		Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Internal		4.253.134.000	
			- LHA Reguler OPD	44 LHA				- LHA Reguler OPD	44 LHA		
			- LHA/LHM Kaji uji	240 LHA/LHM				- LHA/LHM Kaji uji	240 LHA/LHM		
			- Rekapitulasi Laporan Sidak Disiplin Aparat	1 dok				- Rekapitulasi Laporan Sidak Disiplin Aparat	1 dok		
			- LHA Reguler Kecamatan	40 LHA				- LHA Reguler Kecamatan	40 LHA		
2	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah		Terselesaikanya kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	100 %	417.513.000	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah		Terselesaikanya kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	100 %	417.513.000	
3	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan		Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan	4 jenis dok	359.537.000	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan		Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan	4 jenis dok	359.537.000	
4	Koordinasi Pengawasan Komprehensif		Jumlah Pelaksanaan koordinasi Pengawasan	2 jenis dok	189.086.000	Koordinasi Pengawasan Komprehensif		Jumlah Pelaksanaan koordinasi Pengawasan	2 jenis dok	189.086.000	
5	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan		Jumlah evaluasi temuan hasil pengawasan (Audit)	3 jenis dok	231.778.000	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan		Jumlah evaluasi temuan hasil pengawasan (Audit)	3 jenis dok	249.178.000	
6	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Lampiran Hasil Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 jenis dok	644.078.000	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Lampiran Hasil Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 jenis dok	644.078.000	
7	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di Lingkup Desa		Jumlah Pengawasan Pemerintahan Desa	1 dok	939.673.000	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di Lingkup Desa		Jumlah Pengawasan Pemerintahan Desa	1 dok	939.673.000	
8	Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD		Hasil Laporan Monitoring SKPD	6 jenis dok	324.752.000	Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD		Hasil Laporan Monitoring SKPD	6 jenis dok	324.752.000	
9	Pelaksanaan Pemeriksaan/Audit Tematik		Jumlah Pengawasan/Audit Tematik		263.857.000	Pelaksanaan Pemeriksaan/Audit Tematik		Jumlah Pengawasan/Audit Tematik		263.857.000	
			- Audit Kinerja Puskesmas	20 LHA				- Audit Kinerja Puskesmas	20 LHA		
			- Audit DSP dan SPP Sekolah Negeri	20 LHA				- Audit DSP dan SPP Sekolah Negeri	20 LHA		
			- Audit BOS	20 LHA				- Audit BOS	20 LHA		
			-Audit Fasos dan Fasum	20 LHA				-Audit Fasos dan Fasum	20 LHA		
			-Audit Aset Daerah	20 LHA				-Audit Aset Daerah	20 LHA		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kegutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				208.892.000	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				464.867.000	
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		- Jumlah Peserta Pelatihan di Kantor Sendiri	70 orang	208.892.000	1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		- Jumlah Peserta Pelatihan di Kantor Sendiri	70 orang	464.867.000	
			- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	70 orang				- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	70 orang		
			- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Review Pra RKA	70 orang				- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Analisis Pemecahan Masalah	70 orang		
			- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Laporan Keuangan	70 orang				- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Audit Khusus/Forensik	70 orang		
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan		Jumlah peralatan uji untuk pemeriksaan		-	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan		Jumlah peralatan uji untuk pemeriksaan		-	
			-Hammer Test	20 Unit				-Hammer Test	20 Unit		
			-Core Drilled Test	1 Unit				-Core Drilled Test	1 Unit		
			-Alat Uji Ketebalan	20 Unit				-Alat Uji Ketebalan	20 Unit		
			-Alat Ukur/Meteran	20 Unit				-Alat Ukur/Meteran	20 Unit		
			-Pakaian dan atribut penunjang pemeriksaan	50 setel				-Pakaian dan atribut penunjang pemeriksaan	50 setel		
8	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan				352.207.000	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan				719.947.000	
1	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Kebijakan Sistem operasional audit dan Prosedur penilaian raport kinerja Pengawasan dan Evaluasi SPIP, Etos Kerja dan Kepuasan Kerja	3 jenis dok	298.668.000	1 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Kebijakan Sistem operasional audit dan Prosedur penilaian raport kinerja Pengawasan dan Evaluasi SPIP, Etos Kerja dan Kepuasan Kerja	3 jenis dok	666.408.000	
2	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara Online		Prosentase Laporan Hasil Pemantauan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (%)	1 dok	53.539.000	2 Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara Online		Prosentase Laporan Hasil Pemantauan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (%)	1 dok	53.539.000	
					11.625.294.000					12.266.409.000	

Tabel 2.4
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2017

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi	Cibinong		1 Tahun	1.795.494.000	APBD II	
	Perkantoran						
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah kebutuhan untuk surat menyurat	0 jenis materai	-		
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah kebutuhan sarana komunikasi, air, listrik dan internet	2 jaringan telepon 1 jaringan air 2 jaringan listrik 1 jaringan internet	218.400.000		
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	14 dok STNK Kendaraan Roda 2 14 dok STNK Kendaraan Roda 4	14.700.000		
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		-Jumlah petugas kebersihan -Jumlah alat kebersihan kantor	7 orang 14 jenis	149.303.000		
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah kebutuhan ATK untuk pelaksanaan tupoksi	41 jenis	43.763.000		
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	-Barang cetakan: -Penggandaan :	7 jenis 2 jenis	40.499.000	
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis	22.889.000		
	8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang disediakan	- Surat Kabar - Majalah - Buku perundang-undangan	1 jenis 1 jenis 1 jenis	42.075.000	
	9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		- Jumlah isi ulang tabung pemadam kebakaran - Jumlah isi ulang tabung gas	5 kali 120 kali	20.960.000		
	10 Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah jamuan makan dan minum	- Rapat : - Tamu :	24 kali 30 kali	45.750.000	
	11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah		Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan	- Perjalanan Dalam Daerah - Perjalanan Luar Daerah	42 hari 53 hari	269.560.000	
	12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran	4 orang	118.094.000		
	13 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD		Jumlah dokumen pengelolaan arsip SKPD	4 jenis dok	196.103.000		
	14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian		Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian	6 jenis dok	383.454.000		
	15 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang		Jumlah dokumen pengelolaan administrasi barang	3 jenis dok	127.108.000		
	16 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor		Jumlah piket keamanan kantor	4 orang	102.836.000		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				460.598.000		
	1 Pengadaan Peralatan Kantor		Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan	3 jenis 6 unit	-		
	2 Pengadaan Perlengkapan Kantor		Jumlah Perlengkapan kantor yang dibutuhkan	- CCTV - Stabilizer - Sound System - Papan Nama Organisasi	5 Jenis 2 Jenis 5 Jenis 3 Jenis	-	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor SKPD yang terpelihara		136.325.000		
			- Pemeliharaan Ruang Arsip	2 gedung			
	4 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas Yang dibutuhkan		169.325.000		
			-Kendaraan Roda 4	14 Unit			
			-Kendaraan Roda 2	14 Unit			
	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor		Jumlah peralatan kantor di SKPD yang terpelihara	2 jenis	58.334.000		
	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor di SKPD yang terpelihara	1 jenis	50.739.000		
	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor		Luas tanaman dan halaman kantor yang terpelihara	200 m2	-		
	8 Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Listrik Kantor		Jumlah Jaringan/Instalasi Listrik yang terpelihara	2 Gedung	45.875.000		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				75.750.000		
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan (orang)	99 orang	75.750.000		
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				61.720.000		
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah peserta bimbingan teknis, penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus, dan diklat yang terkirim	15 orang	13.000.000		
	2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		-Jumlah peserta sosialisasi -Jumlah peserta Workshop PPG	80 orang 80 orang	48.720.000		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				1.047.225.000		
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah LAKIP dan LKPJ	2 jenis dok	252.314.000		
	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2 jenis dok	50.274.000		
	3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 jenis dok	50.750.000		
	4 Penyusunan Perencanaan Anggaran		- Tersedianya dokumen DPA dan RKA-P/DPA-P - Tersedianya dokumen Pra RKA dan RKA SKPD Tahun 2015	2 jenis dok 2 jenis dok	194.364.000		
	5 Penatausahaan Keuangan SKPD		Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2016	1 jenis dok	373.222.000		
	6 Penyusunan Renstra SKPD		Jumlah dokumen Renstra SKPD yang tersedia	1 jenis dok	47.266.000		
	7 Penyusunan Renja SKPD		Jumlah dokumen Renja SKPD yang tersedia	1 jenis dok	16.350.000		
	8 Publikasi Kinerja SKPD		Publikasi kinerja SKPD di media	1 tahun	37.000.000		
	9 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		Jumlah dokumen PKPT yang tersedia	1 jenis dok	25.685.000		
6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				7.640.808.000		
	1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di Lingkup OPD		Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Internal - LHA Reguler OPD - LHA/LHM Kaji uji	44 LHA 240 LHA/LHM	4.253.134.000		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Rekapitulasi Laporan Sidak	1 dok			
			Disiplin Aparat				
			- LHA Reguler Kecamatan	40 LHA			
2	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah		Terselesaikanya kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	100 %	417.513.000		
3	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan		Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan	4 jenis dok	359.537.000		
4	Koordinasi Pengawasan Komprehensif		Jumlah Pelaksanaan koordinasi Pengawasan	1 jenis dok	189.086.000		
5	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan		Jumlah evaluasi temuan hasil pengawasan (Audit)	4 jenis dok	249.178.000		
6	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Lampiran Hasil Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 jenis dok	644.078.000		
7	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala di Lingkup Desa		Jumlah Pengawasan Pemerintahan Desa	120 LHA Desa	939.673.000		
8	Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD		Hasil Laporan Monitoring SKPD	5 jenis dok	324.752.000		
9	Pelaksanaan Pemeriksaan/Audit Tematik		Jumlah Pengawasan/Audit Tematik		263.857.000		
			- Audit Kinerja Puskesmas	20 LHA			
			- Audit DSP dan SPP Sekolah Negeri	20 LHA			
			- Audit BOS	20 LHA			
			-Audit Fasos dan Fasum	20 LHA			
			-Audit Aset Daerah	20 LHA			
7	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan				464.867.000		
1	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		- Jumlah Peserta Pelatihan di Kantor Sendiri	70 orang	464.867.000		
			- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	70 orang			
			- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Analisis Pemecahan Masalah	70 orang			
			- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Audit Khusus/Forensik	70 orang			
			- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis Satgas SPIP	70 orang			
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengawasan		Jumlah peralatan uji untuk pemeriksaan		-		
			-Hammer Test	70 Unit			
			-Core Drilled Test	1 Unit			
			-Alat Uji Ketebalan	20 Unit			
			-Alat Ukur/Meteran	20 Unit			
			-Pakaian dan atribut penunjang pemeriksaan	50 setel			
8	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan				719.947.000		
1	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Kebijakan Sistem operasional audit dan Prosedur penilaian raport kinerja Pengawasan dan Evaluasi SPIP, Etos Kerja dan Kepuasan Kerja	2 jenis dok	666.408.000		
2	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara Online		Prosentase Laporan Hasil Pemantauan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (%)	100 %	53.539.000		
					12.266.409.000		

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017
Kabupaten Bogor

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

NIHIL

Tabel 3.1
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017
Kabupaten Bogor

SKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN BOGOR

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Nasional		
	1 Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Kementrian PAN & RB	a Permenpan No 20 Tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi
	2 Monitoring Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi	Perpres	a Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Thn 2012-2025 dan Jangka Menengah Thn 2012-2014
B	Provinsi		
	1 Meningkatkan manfaat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan (<i>Counseling Partner</i>)	Inspektorat Provinsi Jawa Barat	a Peningkatan pemahaman SDM Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah (Fokus)	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif					Prakiraan Maju (2018)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	Lain - Lain	Total Anggaran			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	20	2	21				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor SKPD yang terpelihara	1	gedung	100%	136.325.000		136.325.000	100.000.000	Sedang	Berjalan
									- Pemeliharaan Ruang Arsip									
1	20	2	23				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		- Jumlah kend. roda 4 yang dipelihara	12	unit	100%	169.325.000		169.325.000	160.915.000	Sedang	Berjalan
									- Jumlah kend. roda 2 yang dipelihara	11	unit							
1	20	2	25				Pemeliharaan Genset		- Jumlah Genset yang dipelihara	1	unit	100%	-		-	-	Sedang	Berjalan
1	20	2	29				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor		Jumlah peralatan kantor di SKPD yang terpelihara	2	jenis	100%	58.334.000		58.334.000	55.423.000	Sedang	Berjalan
1	20	2	30				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor di SKPD yang terpelihara	1	jenis	100%	50.739.000		50.739.000	45.164.000	Sedang	Berjalan
1	20	2	31				Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor		Luas tanaman dan halaman kantor yang terpelihara	250	m2	100%	-		-	-	Sedang	Berjalan
1	20	2	32				Pemeliharaan Jaringan/Instalasi Listrik Kantor		Jumlah Jaringan/Instalasi Listrik yang terpelihara	2	Gedung	100%	45.875.000		45.875.000	90.500.000	Sedang	Berjalan
1	20	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										75.750.000		75.750.000	77.150.000		Inspektorat
1	20	3	1				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas yang dibutuhkan (orang)	99	orang	100%	75.750.000		75.750.000	77.150.000	Sedang	Berjalan
1	20	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur				61.720.000		61.720.000	155.751.000		Inspektorat
1	20	5	1				Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah peserta bimbingan teknis, penataran, seminar, workshop, lokakarya, kursus, dan diklat yang terkirim	15	orang	100%	13.000.000		13.000.000	100.409.000	Sedang	Berjalan
1	20	5	2				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah peserta sosialisasi Per UU	80	orang	100%	48.720.000		48.720.000	55.342.000	Sedang	Berjalan
1	20	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja SKPD				1.047.225.000		1.047.225.000	1.243.275.000		Inspektorat
1	20	6	1				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah LAKIP dan LKPJ	3	jenis dok	100%	252.314.000		252.314.000	375.258.000	Sedang	Berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah (Fokus)	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif					Prakiraan Maju (2018)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	Lain - Lain	Total Anggaran			
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	20	6	2				Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	2 jenis dok	Meningkatnya akuntabilitas la keuangan semesteran SKPD	100%			50.274.000		50.274.000	55.873.000	Sedang	Berjalan
1	20	6	4				Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 jenis dok	Meningkatnya akuntabilitas la keuangan akhir tahun SKPD	100%			50.750.000		50.750.000	50.976.000	Sedang	Berjalan
1	20	6	5				- Tersedianya dokumen DPA dan RKA-P/DPA-P	2 jenis dok	Terarahnya perencanaan angg perubahan tahun 2014 dan	100%			194.364.000		194.364.000	200.220.000	Sedang	Berjalan
							- Tersedianya dokumen Pra RKA dan RKA SKPD Tahun 2014	2 jenis dok	anggaran 2015									
1	20	6	6				Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan SKPD Tahun 2012	1 jenis dok	Terwujudnya administrasi keu SKPD	100%			373.222.000		373.222.000	415.328.000	Sedang	Berjalan
1	20	6	7				Jumlah dokumen Renstra SKPD yang tersedia	1 jenis dok	Terarahnya rencana strategis S	100%			47.266.000		47.266.000	39.000.000	Sedang	Berjalan
1	20	6	8				Jumlah dokumen Renja SKPD yang tersedia	1 jenis dok	Terarahnya rencana kerja SKP	100%			16.350.000		16.350.000	25.500.000	Sedang	Berjalan
1	20	6	13				Publikasi kinerja SKPD di media	1 tahun	Tersampainya informasi kii SKPD kepada masyarakat luas	100%			37.000.000		37.000.000	48.100.000	Sedang	Berjalan
1	20	6	14				Jumlah dokumen PKPT yang tersedia	1 jenis dok	Terwujudnya rencana kerja pengawasan tahunan	100%			25.685.000		25.685.000	33.020.000	Sedang	Berjalan
1	20	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				Meningkatkan pelaksanaan Kebijakan KDH	100%					7.640.808.000		7.640.808.000	13.238.331.000		Inspektorat
1	20	20	1				Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Internal		Terwujudnya peningkatan Sist Pengawasan Internal	100%			4.253.134.000		4.253.134.000	7.186.838.000	Sedang	Berjalan
							- LHA Reguler OPD	44 LHA										
							- LHA/LHM Kaji uji	240 LHA/LHM										
							- Rekapitulasi Laporan Sidak Disiplin Aparat	1 dok										
							- LHA Reguler Kecamatan	40 LHA										
1	20	20	2				Terselesaikannya kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	100 %	Terwujudnya peningkatan Sist Pengawasan Internal	100%			417.513.000		417.513.000	530.528.000	Sedang	Berjalan
1	20	20	6				Jumlah tindak lanjut hasil temuan Pengawasan	5 jenis dok	Terwujudnya peningkatan Sist Pengawasan Internal	100%			359.537.000		359.537.000	584.116.000	Sedang	Berjalan
1	20	20	7				Jumlah Pelaksanaan koordinasi Pengawasan	1 jenis dok	Terwujudnya peningkatan Sist Pengawasan Internal	100%			189.086.000		189.086.000	250.657.000	Sedang	Berjalan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah (Fokus)	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif					Prakiraan Maju (2018)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan		APBN	APBD I	APBD II	Lain - Lain	Total Anggaran				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	20	43				Meningkatnya dan sempurnanya kebijakan sistem	100%						719.947.000		719.947.000	755.570.000		Inspektorat	
1	20	43	3			Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	prosedur pengawasan	Kebijakan Sistem operasional audit dan 3 jenis dok	Terusnya Kebijakan Sistem dan Prosedur pengawasan	100%			666.408.000		666.408.000	650.511.000		Sedang Berjalan	
								Prosedur penilaian raport kinerja											
								Pengawasan dan Evaluasi SPIP, Etos Kerja dan Kepuasan Kerja											
1	20	43	4			Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi secara Online		Prosentase Laporan Hasil Pemantauan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (%)	100 %	Tersusunnya laporan PMRB	100%		53.539.000		53.539.000	105.059.000		Sedang Berjalan	
JUMLAH													12.266.409.000		12.266.409.000	18.549.045.800			